



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum dilengkapi dengan uraian jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
  - b. bahwa untuk rekrutmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di linkgkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
5. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mengurai data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyiapkannya bagi penyusunan program kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
6. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
8. Jabatan Non struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;

BAB II  
INFORMASI JABATAN  
Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Sosial terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas Sosial
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
      - a) Analisis Tata Usaha
      - b) Pengadministrasi Umum
      - c) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
      - d) Pengemudi
      - e) Pramuk Kebersihan
      - f) Petugas Keamanan
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :
      - a) Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
      - b) Pengadministrasi Umum
    3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, terdiri dari :
      - a) Analisis Laporan Keuangan
      - b) Bendahara
      - c) Verifikator Keuangan
      - d) Pengelola Gaji

- c. Kepala Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri dari :
  - 1. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, terdiri dari :
    - a) Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya Dan Tradisi
    - b) Penjaga Taman Makam Pahlawan
  - 2. Kepala Seksi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    - a) Analis Sistem Informasi
    - b) Pengolah Data
- d. Kepala Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pananganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - 1. Kepala Seksi Bantuan dan Urusan Korban Bencana, terdiri dari :
    - a) Analis Bencana
    - b) Pengadministrasi Umum
  - 2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
    - a) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat
    - b) Pengadministrasi Umum
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    - a) Analis Pemberdayaan Masyarakat
    - b) Pengadministrasi Umum
  - 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, terdiri dari :
    - a) Analis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan
    - b) Pengadministrasi Umum
- f. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - 1. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, terdiri dari :
    - a) Analis Pelayanan Sosial
    - b) Pengadministrasi Umum
  - 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    - a) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
    - b) Pengadministrasi Umum

### Pasal 3

Kegunaan Uraian Jabatan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pengadaan Pegawai dalam membuat formasi PNS, Mutasi PNS dan Promosi PNS.

### Pasal 4

Item dari Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Nama Jabatan
- b. Kode Jabatan
- c. Unit Kerja
- d. Ikhtisar Jabatan
- e. Syarat Jabatan
- f. Tugas Pokok

- g. Bahan Kerja
- h. Perangkat Kerja
- i. Tanggung Jawab
- j. Wewenang
- k. Korelasi Jabatan
- l. Kondisi Lingkungan Kerja
- m. Resiko Bahaya
- n. Syarat Jabatan Lain
- o. Prestasi Kerja yang diharapkan
- p. Kelas Jabatan

#### Pasal 5

Dokumen Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



**M. SALEH, SH, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR 67